BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai bangunan paradigma, transmodernisme lahir dari kesadaran tentang bahaya humanism modern yang berujung pada pembunuhan kemanusiaan dan karakter. Marx Luyckx Ghisi dalam “*Toward a Transmodern Transformation of Our Global Society: European Challenges and Opportunities*” mengungkapkan jika manusia modern meneruskan proyek industrialisasi, kapitalisme, dan strategi yang berbasis patriarki, maka dunia akan berujung pada bunuh diri kolektif, karena dampaknya yang berbahaya terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan kolektif ataupun kelestarian lingkungan. Beberapa budaya kreatif pinggiran dalam kebiasuannya telah menyuarakan perlawanan terhadap sistem yang merusak ini, namun ketiadaan kekuatan menyebabkan mereka terhenyak tanpa daya di sudut-sudut peradaban modern. Sistem budaya marjinal yang berbasis pada sistem *mathernalistik* ini, sangat berseberangan dengan modernisme, menghargai alam dan memiliki kepedulian terhadap komunitas sosial dalam hubungan kekerabatan yang kental.¹

Transmodernisme karena itu lahir sebagai respon terhadap berbagai fenomena modernitas yang dalam perkembangannya dewasa ini dikhawatirkan dapat membayakan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk itu,

¹ Marx Luyckx Ghisi, *Toward a Transmodern Transformation of Our Global Society: European Challenges and Opportunities*, (Journal of Future Studies, September 2010, No.151), hlm.40.

transmodernitas mencoba menetralsir bahaya tersebut dengan mengungkap ide-ide kearifan lokal tradisional yang perlu diangkat kembali ke permukaan publik setelah melalui proses “*empowering*”, mengingat ketidak mampuannya menyuarakan diri, karena kungkungan dogmatis yang telah mengendap sekian lama. Dalam upaya ini, transmodernisme banyak meminjam konsep-konsep pemikiran khas kaum postmodernisme. Namun tidak semua pandangan postmodernisme diterima, postmodernisme tetap membutuhkan proses kritisi lebih jauh.

Konteks pemikiran transmodernisme dapat diungkapkan dalam kata sederhana sebagai modernitas yang mengakui transendensi, dan postmodernisme tanpa kebuntuan ataupun *chaos*. Transmodernisme pada dasarnya merupakan hasil dialektika yang cair dan integral antara tradisionalisme, modernisme, dan postmodernisme, yang pada saat yang bersamaan mencoba membangun sistem epistemology, namun pada saat yang sama dapat melampaui ketiganya. Transmodernisme juga dapat dilihat sebagai sintesis antara masa lalu, masa kini, dan masa depan, yang diproyeksikan dalam konteks kekinian.

Karena itu, meminjam pendapat Ziauddin Sardar, transmodernisme pada dasarnya merupakan proyek yang diarahkan untuk mengatasi krisis modernisme dan transmodernisme, dalam upaya mengurangi berbagai dampak modernitas dan kekacauan transmodernitas.² Pertanyaannya kini adalah, dari mana proyek transmodernitas mesti dimulai? Bersandar pada

² Ziauddin Sardar, *Islam, Postmodernism and Other Futures: A Ziauddin Sardar Reader*, edited by Sohail Inayatullah and Gail Boxwell (London: Pluto Press, 2003), hlm. 5.

jawaban Sardar, kehati-hatian mutlak dibutuhkan, karena pertanyaan tidak muncul dalam ruang hampa (*vacuum*), namun tumbuh dalam sebuah *framework* dan konteks tertentu, yang sekaligus dapat mengarahkan pada jawaban pertanyaan. Untuk itu pertanyaan di atas mesti ditempatkan dalam sebuah *framework* dan juga konteks tertentu, sehingga dapat memunculkan pertanyaan tentang berbagai masalah menyangkut realitas kehidupan masyarakat kontemporer, seperti bagaimana menemukan prinsip-prinsip kebebasan yang memiliki sensitivitas terhadap komunitas minoritas dalam konteks pluralitas dan modernitas?³ Pertanyaan-pertanyaan ini hanya dapat dijawab dengan menelisik konteks modernitas dan postmodernitas secara kritis, untuk dapat memahami konteks, mengambil kelebihan, menyadari kelemahan, dan menemukan alternatif solusi.

Kota Malang merupakan kota unggulan di bidang pariwisata. Hal ini terwadahi dalam konsep Tribina Cita Kota Malang, dimana salah satunya adalah menjadikan Malang sebagai kota pariwisata. Disamping kota Malang sebagai salah satu tujuan wisata, kota ini tumbuh sebagai kota industri serta kota perdagangan dan jasa. Kemampuan ekonomi dan perdagangan yang sangat besar mampu merubah orientasi Kota Malang dari kota pariwisata menjadi kota wisata belanja. Pada akhirnya, sebutan ini dijadikan identitas Kota Malang sekarang.

³ Lihat Ziauddin Sardar, *Transmodernity: Art Modernity and Multiculturalism, Where does Multiculturalism Come From? Ziauddin Sardar Unpicks its Origins and Implications and Proposes an Alternative Model*, dalam *Art Council England, Navigating Difference: Cultural Diversity and Audience Development*, (tp: tt), 31. Bandingkan Ziauddin Sardar, "Asking the Wrong Question can be Fatal", dalam *The Guardian*, London, 21 January, 2005, hlm.27.

Dengan potensi tersebut, Kota Malang mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam satu dasawarsa terakhir ini. Perkembangan fisik yang terlihat adalah pemekaran wilayah kotanya. Perkembangan fisik kota tersebut pada akhirnya menarik suatu aktivitas lanjutan di sektor informal, berupa menjamurnya usaha oleh sektor informal pedagang kaki lima (PKL) yang sebagian besar memanfaatkan ruang publik kota. Penggunaan ruang publik kota dan ruang terbuka kota untuk kepentingan PKL tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan kuantitas dan kualitas ruang terbuka kota.

Keberadaan PKL, pada satu sisi, dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi sebagian kebutuhannya yang tidak bisa disediakan oleh jasa sektor formal. PKL menyediakan jasa sandang pangan dan rekreasi murah terjangkau bagi sebagian warga masyarakat kota. Pada lokasi tertentu keberadaan PKL juga bermanfaat bagi masyarakat yang melintasinya. Dilihat sebagai kelompok usaha keberadaan PKL dapat memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah dari sisi perijinan dan retribusi. Di sisi lain, keberadaan PKL yang banyak memanfaatkan ruangan kota dirasakan sebagai sesuatu yang meresahkan kepentingan publik. Lokasi PKL tersebut akan mengurangi kenyamanan publik untuk menikmati dan memanfaatkan keindahan ruang terbuka sebagai tempat untuk berkumpul dan menjalin hubungan sosial kemasyarakatan, sedangkan lokasi PKL yang berada di daerah pedestrian dan sebagian badan jalan di pusat kota dirasakan cukup mengganggu kelancaran pejalan kaki dan pengendara,

disamping juga mengganggu kelancaran pencapaian pemilik dan pengunjung pertokoan di sekitarnya.

Beberapa produk kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menertibkan usaha informal tersebut. Kebijakan tersebut bahkan telah disempurnakan beberapa kali dengan melibatkan beberapa kelompok masyarakat kota yang terkait dan disertai tindakan teknis pada beberapa saat terakhir. Namun demikian, upaya penertiban PKL tersebut hingga saat ini masih terlihat kurang optimal. Pemerintah Kota Malang masih terus berupaya mencari terobosan-terobosan pengelolaan yang tepat bagi PKL hingga kepentingan semua pihak dapat terakomodir secara berkeadilan.

Fenomena urbanisasi di dunia ketiga yang cukup menarik adalah aktivitas sektor informal. Sektor informal menjadi aktivitas ekonomi alternatif bagi penduduk kota yang membuktikan kemampuannya untuk dapat bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit sekalipun. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa usaha-usaha pembangunan yang selama ini digalakkan pemerintah sudah banyak membawa hasil pada kehidupan masyarakat. Pembangunan yang selama ini dititik beratkan pada sektor formal seperti penanaman industrialisasi.

Sektor informal sering dikaitkan dengan suatu antisipasi timbulnya akibat negatif dari pertumbuhan penduduk kota. Pertumbuhan penduduk ini cenderung menunjukkan perkembangan yang sangat cepat, sehingga kota selalu menjadi konsentrasi penduduk suatu negara. oleh sebab itu

tidak mengherankan jika kondisi tersebut menjadi daya tarik bagi penduduk sekitarnya untuk datang ke wilayah perkotaan.

Kebanyakan negara berkembang seperti Indonesia, sektor formal yang kian berkembang sering kali tidak disertai oleh kualitas sumber daya manusia, sementara untuk dapat tepat di sektor formal, tingkat pendidikan dan keahlian menjadi syarat kualifikasi yang utama. Karakteristik kedua sektor tersebut (formal-informal) menjadi kian jelas ditengah-tengah masyarakat dengan keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang diperparah oleh keterbatasan lapangan kerja.

Dalam kenyataannya, para pelaku sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL)⁴ sering di posisikan dalam pengertian negatif semata, yaitu sebagai simbol ketertinggalan, kesemerawutan kota, sumber kemacetan jalan dan berbagai simbol-simbol negatif lainnya. Terlepas dari potensi ekonomi kegiatan perdagangan kaki lima, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota. Oleh karena itu, PKL seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah kota.

Kota di Indonesia yang akhirnya bertumbuh seiring dengan dinamika sosial masyarakatnya, sejatinya masih sangat angkuh buat pendatang yang tidak punya kekuatan ekonomi, kemampuan pikir maupun kompetensi lainnya. Kota yang tumbuh dalam ruang ekonomi hampir

⁴ Pedagang kaki lima adalah sebuah istilah yang diambil dari peraturan Belanda mengenai lebar trotoar di depan pertokoan, yang setidaknya harus memiliki luas 5 kaki. Peraturan ini dibuat untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pejalan kaki

dipastikan cuma menjadi ruang kontestasi bagi penguasa-penguasa kapital. Sering kita dengar, sebuah lokasi di kota yang menurut rencana tata ruang dan wilayah (RT/RW) sejatinya bukan daerah bisnis melainkan sebagai daerah resapan air, tetapi karena kemampuan penguasa kapital mengendalikan penguasa kota menjadikan dengan sangat mudahnya lokasi tersebut di sulap menjadi wilayah bisnis. Akhirnya ruang kota cuma didesain bagi pemenuhan syahwat konsumsi belaka. Manakala ribuan migran beradu nasib di kota, yang bisa mereka lakukan cuma mengais remah-remah kapital yang tercecer dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan marjinal yang memang diperuntukkan untuk hirarki terendah dalam piramida masyarakat kota. Pekerjaan yang marjinal (dalam hal ini pekerjaan informal lebih spesifiknya pedagang kaki lima) maka ruang kota begitu kejam untuk selalu menjadikan mereka sasaran utama penertiban kota. Dalam pandangan penguasa kapital carut marut keindahan kota tidak bisa dilepaskan dari wajah kotor dan buram dari kelompok informal ini. Secara sosiologis bisa dipahami, jika munculnya aturan yang berkaitan dengan perencanaan kota seringkali merupakan ruang berkelindannya penguasa kota dengan penguasa kapital. *No way out* atau tidak ada jalan keluar buat pekerja informal (pedagang kaki lima) menjadikan merekapun harus melakukan siasat sedemikian rupa agar tetap bisa bertahan dan dalam batas-batas tertentu bisa bersaing memperebutkan kue ekonomi yang lebih besar lagi.

Sebagai kelompok yang sejatinya tidak diinginkan oleh pengambil kebijakan kota, mereka harus tetap bisa menghidupi dirinya sendiri. Menurut Didik J. Rachbini dan Abdul Hamid hal tersebut disebabkan kebijakan pembangunan yang tidak diikuti oleh kesadaran untuk memberikan peluang dan suasana yang mendukung mereka yang bergerak di sektor informal sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk berpartisipasi.⁵

Pola ekologis dalam bentuk survival dari kelompok sosial yang berbasis *subsistence* tersebut, maka pedagang kaki lima akan memanfaatkan setiap jengkal ruang kota yang dianggap punya nilai ekonomis untuk mempertahankan hidupnya. Dalam pemahaman Max Weber rasionalitas instrumental yang lebih dikedepankan. Menurut Max Weber dalam Agus Salim bahwa rasionalitas instrumental merupakan bentuk rasional yang paling tinggi dengan unsur pertimbangan pilihan yang rasional sehubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat yang dipilihnya.⁶

Bagi pedagang kaki lima, setiap jengkal tanah yang mereka gunakan untuk berdagang pada dasarnya adalah ruang ekonomi utama yang mereka miliki dan harus mereka pertahankan mati-matian. Pedagang kaki lima sebagai kelompok masyarakat yang *subsistence* melihat bahwa lapak tempat mereka berdagang adalah sarana untuk mewujudkan

⁵ Rachbini, J, Didik, dan, Hamid, Abdul, *Ekonomi Informal Perkotaan*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 8.

⁶ Salim, Agus, *Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 40.

rasionalitas instrumentalnya sehingga apapun akan dilakukan untuk mempertahankan diri. Jika perlu dengan cara (alat) konflik.

Tempat berdagang merupakan sesuatu yang sangat penting bagi pedagang kaki lima karena sejangkal tanah tempat mereka berusaha adalah satu-satunya cara mereka mempertahankan hidupnya di kota. Seringkali mereka menempati kawasan yang diklaim oleh pemerintah kota melanggar peraturan. Sementara, karena pedagang kaki lima yang berjualan di tempat tersebut sudah menjadi sebuah komunitas. Pengambil kebijakan kota tidak bisa serta merta mengusir mereka. Sebagai komunitas dengan keimunan nilai bersama tentunya menjadi riskan jika perlakuan kasar menjadi cara dominan. Tarik menarik kepentingan yang akhirnya harus berujung pada konflik antara mereka seringkali menjadi pemandangan umum dalam penanganan pedagang kaki lima. Ruang kota yang dalam piramida masyarakat kota seringkali dipahami hanya untuk masyarakat kota, berimplikasi sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat migran. Kedatangan mereka ke kota untuk mencari kerja karena hampir semua capital desa tersedot ke kota (perampasan desa oleh kota) berujung pada ternafikannya mereka dari riuh rendahnya semangat perayaan ekonomi masyarakat kota. Sehingga bisa dipahami ketika masyarakat migran (pedagang kaki lima) sudah punya kekuatan sebagai sebuah kelompok sosial, seringkali berseteru dengan penguasa kota adalah cara yang harus mereka tempuh untuk mempertahankan diri.

Beberapa kasus penggusuran sebagaimana disinggung di atas, khususnya penggusuran PKL secara paksa hanyalah contoh kecil poros kesejahteraan sosial dan komitmen keadilan yang sering diabaikan negara dalam setiap pengambilan kebijakan. Ia juga menjadi bukti struktur relasi yang tidak seimbang antara negara, institusi modal, dan komunitas rakyat. Dari situlah, komitmen keadilan dan detak kesejahteraan sosial sebagai filsafat politik yang mendasari berdirinya negara ini perlu terus menerus diawasi dan diprioritaskan. Negara harus meneguhkan dan mengayunkan kembali cita-cita keadilan sosial terhadap rakyat yang selama ini menjadi bagian dari eksistensinya. Aspek keadilan sosial sebagai ujung proses pembangunan harus menjadi pijakan utama dalam sebuah kebijakan publik dan bukan semata-mata hanya soal kemakmuran ekonomi.

Di samping itu, adalah hak warga negara untuk menolak penggusuran, apalagi jika penggusuran tersebut tidak benar-benar memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang terkena penggusuran. Pemerintah harus bijak dalam melakukan penggusuran, dalam artian, pemerintah tidak boleh mengesampingkan hak dari masyarakat yang terkena penggusuran. Pemerintah dalam melakukan penggusuran juga harus tetap memperhatikan etika sosial.

Itulah sepenggal fenomena aktual yang menghiasi perjalanan bangsa ini. Bangsa yang hidupnya berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama Pancasila), tetapi seringkali memusuhi pihak yang paling dikasihi Tuhan (rakyat miskin dan tertindas/kaum *duafa*⁷). Masih banyak

fenomena serupa yang terjadi di setiap sudut tanah air ini: penggusuran, perampasan hak, dan lain-lain. Tapi seolah telah menjadi hal yang biasa, berbagai tindak kedzaliman dan ketidakadilan itu telah dianggap sebagai tindakan pembangunan dan pengorbanan untuk kesejahteraan bersama (namun, siapa yang akhirnya sejahtera?).

“Pembangunan” dan “kepentingan umum” (*al mashlahah al ammah/ public interest*) yang sering menjadi kata kunci penggusuran lahan pencaharian rakyat, hanyalah kamufase untuk mengelabui rakyat. Padahal yang sebenarnya punya kepentingan adalah mereka para konglomerat, dan orang-orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan, dan memang merekalah yang kelak akan menikmati keuntungan itu, bukan rakyat yang digusur atau dirampas haknya.

Memang, selama ini nalar yang terbangun di benak public yang seolah olah telah menjadi doktrin adalah bahwa setiap “kepentingan umum” apa pun wujud dan bagaimanapun intensitasnya harus diprioritaskan, didahulukan, dimenangkan, dan dinomor wahidkan atas “kepentingan individu” atau personal. Nalar semacam ini memang tidak mengada ngada, ada satu kaidah yang mendasarinya, yaitu: “*al mashlahah al 'ammah muqaddam 'ala al mashlahah al fardiyyah*”. Namun, apakah memang demikian pemahaman yang dikehendaki oleh kaidah hasil rumusan para Juris Islam (*ushuliyyun*) itu? Lantas, apakah kemudian penggusuran lahan pencaharian rakyat dengan dalih kepentingan umum yang kerap kali terjadi kita terima bahkan kita amini begitu saja sebagai

sebuah kemestian dan bahkan kebenaran secara *taken for granted*, tanpa *reserve* sama sekali, tanpa proses negoisasi (*negotating process*) yang sah dan adil serta bebas dari intervensi pihak manapun? Siapakah sebenarnya yang berhak melakukan pengusuran itu? Apakah setiap pihak (*baik secara pribadi, tokoh masyarakat/ public figure, lembaga dan organisasi keagamaan*) atas nama kepentingan umum lantas begitu saja dapat melakukan pengusuran atau tindakan-tindakan semisal dengan mengorbankan kepentingan kepentingan individu? Jika tidak demikian, lantas bagaimana pula mekanisme (proses dan prosedur) yang absah sehingga “kepentingan umum” itu layak untuk didahulukan dan dimenangkan dalam kasus pengusuran? Disamping pertanyaan pertanyaan tersebut, pertanyaan yang juga layak diajukan adalah bagaimana sebenarnya corak, motif, dan strategi yang terjadi dalam proses pengusuran PKL selama ini?

Kajian ini akan menyorot problem pengusuran yang sering melibatkan rakyat kecil *vis a vis* kekuasaan yang akan ditinjau dari perspektif “*Fiqh mustadh’afin*” (*nahwa fiqihin li al duafa’ wa al-mustadh’ifin*) dengan menggunakan pisau *maqoshid syari’ah*. *Mustadh’afin* yang dimaksud di sini adalah kalangan dari golongan lemah, yaitu lapisan sosial yang paling rendah dan lemah, buruh, petani, yang kerap kali teraniaya dan terampas hak-haknya.⁷ Mengapa harus *Fiqh mustadh’afin*? Karena *Fiqh mustadh’afin* punya komitmen untuk berpihak

⁷ Lihat Nur Khalik Ridwan, *Agama Borjuis: Kritik Atas Nalar Islam Murni* (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2004), hlm.41., lihat juga idem, *Islam Borjuis* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), khususnya bab II.

dan sekaligus memberikan advokasi kepada mereka yang lemah dan teraniaya, bukan sebaliknya yang mendukung kekuasaan dengan memback upnya melalui simbol-simbol keagamaan. *Fiqh mustadh'afin* adalah milik mereka yang lemah dan terlemahkan atau tertindas, sekaligus menjadikan orang-orang yang berbuat dzalim dan tidak adil sebagai musuh yang harus diperangi. Dengan kata lain *Fiqh mustadh'afin* dilahirkan sebagai *Fiqh* yang pro rakyat (suatu komunitas yang sering tertindas), bukan *Fiqh* penguasa. Ia diupayakan selalu bergerak dan digerakkan demi, oleh dan untuk rakyat mayoritas. Ia menjadi *fiqh* humanis yang menentang *Fiqh* struktur otoritarian.

B. Fokus Penelitian

Dari berbagai pertimbangan dan gambaran di atas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah peoblem yang di hadapi oleh para pedagang kaki lima untuk menghidupi keluarga mereka sekaligus sebagai sumber penghasilan keluarga, ketika berhadapan dengan kebijakan public yang tidak menerima keberadaannya, sehingga mereka tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan keluarganya dan merasa dikucilkan dan termajinalkan.

Adapun penjabaran masalah tersebut dirumuskan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Malang tentang pengusuran pedagang kaki lima?

2. Bagaimana tinjauan *Fiqh mustadh'afin* terhadap kebijakan Pemerintah Kota Malang tentang pengurusan pedagang kaki lima?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian meliputi:

1. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Malang tentang pengurusan pedagang kaki lima.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh mustadh'afin* terhadap kebijakan Pemerintah Kota Malang tentang pengurusan pedagang kaki lima.

D. Signifikansi Penelitian

1. Aspek Teoritis
 - a. Dari segi akademik, penelitian ini memberikan sumbangan khazanah pemikiran dan pengetahuan terkait *Fiqh mustadh'afin*, yang selama ini hanya di tinjau dari nash saja, tanpa dilihat dari kacamata *Fiqh* dan *istimbathnya*.
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat terkait keadaan kaum kaum lemah dalam perspektif *Fiqh mustadh'afin*.
2. Aspek Praktis

Memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya melindungi akan haknya kaum lemah, guna terciptanya negara dan masyarakat yang mempunyai nilai kemanusiaan.
3. Aspek rekomendatif

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai rekomendasi bagi pemerintah terkait dengan kebijakan kebijakan yang harus berpihak pada kaum lemah.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut.

1. Penegasan konseptual

Judul skripsi ini adalah “Tinjauan *Fiqh mustadh’afin* terhadap kebijakan pemerintah kota Malang tentang pengusuran pedagang kaki lima”, maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah:

a. Tinjauan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian ditinjau adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).⁸

b. *Fiqh mustadh’afin*

Fiqh mustadh’afin sesuatu yang memberi panduan kepada umat untuk dapat memformulasikan bentuk-bentuk perlawanan kepada kezhaliman sebagai manifestasi perjuangan menegakkan

⁸ <https://kbbi.web.id/tinjauan> (Di akses pada hari, Rabu, 12 Desember 2018 pukul 14.50)

keadilan dan kemaslahatan di muka bumi perspektif hukum islam.

c. Kebijakan

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas kebawah.⁹

d. Pedagang kaki lima

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian). Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang 'mangkal' secara statis di

⁹ Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 20.

trotuar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan).¹⁰

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Tinjauan *Fiqh mustadh’afin* terhadap kebijakan pemerintah kota Malang tentang pengusuran pedagang kaki lima” adalah bagaimana *Fiqh mustadh’afin* sebagai cara pandang terhadap fenomena kaum lemah yang dalam hal ini yaitu pedagang kaki lima, yang kemudian akan memberikan solusi atau rambu-rambu kepada kebijakan public tentang pengusuran pedagang kaki lima.

F. Sistematika pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, sistematis dan menyeluruh dalam penelitian skripsi ini, maka dapat dilihat dari sistematika penulisan yang terdiri dari VI bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

Bab I : Pendahuluan, merupakan bab yang pertama dalam penulisan karya ilmiah ini, agar tujuan dari penelitian benar-benar tercapai,

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima (Di akses hari kamis, 16 Agustus 2018 jam 16.00 WIB)

oleh karena itu, di bab I ini kami sajikan konteks penelitian, fokus penelitian, yang kemudian dari fokus penelitian tersebut dijawab oleh tujuan penelitian, lalu dilanjutkan dengan mendeskripsikan signifikansi/manfaat penelitian ini dan yang terakhir definisi operasional berguna untuk mengetahui maksud peneliti dari setiap kata dalam judul yang telah di pilih. tentunya hal ini berguna untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi ini.

Bab II : Selanjutnya Bab II membahas tentang tinjauan pustaka. Dalam mengawali bab ini dipaparkan tentang objek penelitian, yang dijadikan sebagai *the art of theory*. Dalam hal ini, objek kajian yang di bahas adalah kajian *fiqh mustadh'afin* ditinjau melalui konsep dan pendekatan *maqoshid syari'ah*. Juga konsep-konsep kebijakan Pemerintah Daerah, penerapan kebijakan hingga dampak kebijakan, dan tinjauan tentang pedagang kaki lima. Di mulai dari definisi hingga teori-teori, sehingga teori teori tentang hal tersebut dapat di jelaskan secara rinci. Dilanjutkan dengan penelitian terdahulu untuk memposisikan penelitian ini.

Bab III : bab ini membahas metode penelitian. Didalamnya terdapat rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV : bab ini, membahas tentang paparan data dan temuan penelitian yaitu potret pengusuran pedagang kaki lima di kota Malang.

Mulai dari kebijakan pemerintah kota Malang hingga penerapannya serta dampaknya.

Bab V : bab ini membahas tentang diskusi secara kritis tentang potret potret lemahnya pedagang kaki lima yang berada di kota Malang yang di analisis menggunakan perspektif *fiqh mustadh'afin* melalui pisau *maqoshid syari'ah* yang pada akhirnya akan menghasilkan studi *fiqh* solutif bagi permasalahan yang berkaitan tentang penggusuran pedagang kaki lima atau berkaitan tentang fenomena kaum kaum lemah .

Bab VI :Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi tentang simpulan hasil penelitian ini secara keseluruhan, yang isinya adalah menjawab dari rumusan masalah yang telah ditentukan dalam bab I. Selanjutnya implikasi teoritik juga dibahas untuk melihat posisi teori berdasarkan temuan penelitian, serta keterbatasan penelitian dari aspek akademis maupun non akademis. Selain itu juga di bahas tentang saran di tujukan bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.